KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kunker fiktif berpotensi terus terjadi
Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Kunker Fiktif Berpotensi Terus Terjadi

JAKARTA – Kunjungan kerja (kunker) fiktif berpotensi selalu ada dan terus terjadi, terutama di pemerintah daerah (pemda). Untuk mencegahnya sangat tergantung cara pemerintah mengendalikannya.

Deputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dadang Kurnia mengatakan, saat ini mereka semakin memperketat mengawasi kunker-kunker yang dilakukan aparat pemerintah. Sebagai contoh, untuk perjalanan dinas mereka langsung mengonfirmasinya ke maskapai.

Menurut dia, memang ada perbedaan pengaturan kunker pemerintah pusat dengan pemda. Dalam hal kunker, instansi pusat harus merujuk pada peraturan menteri keuangan (PMK) di mana pembiayaan kunker disesuaikan dengan wilayah yang didatangi. Berbeda dengan pemda yang saat ini diberikan kebebasan menentukan pembiayaan perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan daerahnya.

"Daerah menentukan sendiri. Ada potensi pemborosan kalau tidak sesuai realitasnya. Ada potensi standarnya cukup berapa, tapi dianggarkan di atas itu," katanya saat dihubungi *KORAN SINDO* kemarin.

Dadang menilai kunker tidak serta-merta hanya bentuk pemborosan, melainkan banyak aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Misalnya saja jenis kunker, jumlah pegawai, manfaatnya. Kalau 50 orang yang melakukan kunker patut dipertanyakan.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, potensi kunker fiktif akan selalu ada, baik di ranah eksekutif ataupun legislatif. Misalnya, hanya dua orang pegawai pemda yang datang untuk kunker, padahal dianggarkan sepuluh orang. "Potensi ini berlaku di eksekutif maupun. Jenisnya juga bervariasi. Namanya pemikiran korup tentu apapun bisa dilakukan," tuturnya.

Namun begitu, dia menilai terkadang meski bukan kunker fiktif, tapi ditemukan pemborosan, yakni kunker yang tidak memberikan manfaat dan hanya menghabiskan anggaran. "Kunkernya hanya jalan-jalan. Cari hiburan. Hasilnya tidak jelas dan tidak berpengaruh pada pekerjaan," ucapnya.

Untuk meminimalisasi ini, kata Roy, segala pengawasan harus diperketat. Jangan sampai sekalipun kendur. Pasalnya sekali kendur, maka akan jadi celah penyalahgunaan kunker.

> *"Daerah menentukan sendiri. Ada potensi pemborosan kalau tidak sesuai realitasnya. Ada potensi standarnya cukup berapa, tapi dianggarkan di atas itu."*
>
> **DADANG KURNIA**
> Deputi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKP

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Roy juga menyambut baik inpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo yang memangkas anggaran perjalanan dinas. "Ini baik, melakukan rasionalisasi perjalanan dinas," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim tidak ada ruang bagi kunker fiktif karena semakin ketatnya pelaporan kunker, baik secara administrasi ataupun hasil kunjungan. Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, tidak ada kasus perjalanan dinas fiktif yang ditemukan di kementeriannya karena harus memenuhi segala bukti administrasi dalam laporan kunkernya.

"Bukti perjalanan dinas harus disertai *boarding pass* pesawat, bukti menginap di hotel, dan membuat laporan perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas luar negeri malah harus ada cap imigrasi dari negara yang dikunjungi. Jadi mestinya sudah tidak ada ruang untuk melakukan perjalanan dinas fiktif," katanya.

Setiap perjalanan dinas memiliki maksud dan tujuannya, maka tentu setiap kunker harus memiliki hasil dan wajib dilaporkan kepada atasan dan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat urgensinya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji. Menurut dia, tidak akan lagi ditemukan kunker fiktif di ranah pemerintahan. Ini karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin ketat dalam melakukan pemeriksaan. Laporan administrasi berupa tiket pesawat dan bukti lainnya dinilai cukup meminimalisasi potensi kunker fiktif.

"Misalnya saja sejak 2008, BPK bekerja sama dengan berbagai maskapai penerbangan untuk melakukan pengecekan setiap penerbangan yang digunakan dalam kunker," urainya.

Apalagi hal ini berkaitan erat dengan menjalankan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini juga diperkuat dengan pengawasan aparat internal pemerintah (APIP). Dia menambahkan, bahwa kunker tidak selalu diartikan buruk. Tentunya setiap kunker memiliki sebuah tujuan salah satunya tukar-menukar informasi yang bermanfaat. Ini dibuktikan dengan laporan hasil kunker.

"Misalnya Pak Yus (Yuswandi, sekjen Kemendagri) ke Maroko untuk memperoleh penguatan kecamatan dan desa. Saya kira kunker juga bermanfaat tukar-menukar informasi," paparnya.

dita angga